



BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 16, Agustus 2022

Kebijakan, Output Prioritas Dan Alokasi Anggaran Dalam RAPBN TA 2023 Guna Mendukung Ketahanan Pangan

p.3

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 – 2021

p.8

Dampak Resesi Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Indonesia

p.12

ISO 9001:2015

Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri

Kebijakan, Output Prioritas Dan Alokasi Anggaran Dalam RAPBN TA 2023 Guna Mendukung Ketahanan Pangan

p.3

Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan.

p.8

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 – 2021

BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan.

Dampak Resesi Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Indonesia

p.12

Minusnya perekonomian Amerika Serikat selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2022 mengindikasikan terjadinya resesi di negara tersebut. Dampaknya dirasakan sampai ke Indonesia yang mana merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu diprediksi mengalami penurunan kinerja ekspor, capital outflow modal asing dari Indonesia, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran pasar dalam negeri serta melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi dampak resesi Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dengan menyesuaikan tingkat suku bunga dalam negeri dan penajaman insentif fiskal untuk menarik kembali penanaman modal asing ke Indonesia.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Kebijakan, Output Prioritas dan Alokasi Anggaran Dalam RAPBN TA 2023 Guna Mendukung Ketahanan Pangan

Adhi Prasetyo^{*)}

Abstrak

Negara wajib menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang diikuti dengan alokasi anggaran yang tersebar dalam postur RAPBN TA 2023. Catatan yang menjadi masukan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perlunya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dan sinergitas antara Bapanas, Bulog, dan ID Food untuk menciptakan ketahanan pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan.

Persediaan makanan rakyat merupakan urusan hidup mati sebuah bangsa. Kalau misalnya peperangan dunia ke III meledak, entah besok entah lusa, dan perhubungan antara Indonesia dan Siam dan Birma terputus karena tiada kapal pengangkutan, dari mana kita mendapat beras? Buat apa kita membuang devisa bermiliar-miliar tiap tahun untuk membeli beras dari negeri lain, kalau ada kemungkinan untuk melipatgandakan produksi makanan sendiri. Segala ikhtiar kita untuk menekan harga barang di dalam negeri pun selalu akan kandas, selalu akan sia-sia, selama harga beras periodik membumbung tinggi, karena harga beras memang menentukan harga barang yang lain. Demikian, isi salah satu petikan dari pidato Presiden Soekarno pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952. Meskipun pidato tersebut disampaikan 60 tahun yang lalu, namun rasanya apa yang disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia tersebut masih relevan ditengah dinamika konflik geopolitik global saat ini. Impor terhadap komoditas pangan nasional masih berlangsung, bahkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Di sisi lain merujuk data *Global Food Security Index (GFSI)*, skor indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami

penurunan dari sebelumnya level 61,4 menjadi level 59,2 di tahun 2021. Hal ini mengakibatkan ketahanan pangan Indonesia menempati peringkat 69 dari 113 negara.

Menyikapi pentingnya Pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pembangunan bidang ketahanan pangan kembali hadir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 melalui dukungan kebijakan dan anggaran dalam mendukung ketahanan pangan. Lebih lanjut tulisan ini akan mengulas rincian kebijakan, output prioritas, alokasi anggaran dalam Nota Keuangan (NK) RAPBN TA 2023, serta rekomendasi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Kebijakan dan Output Prioritas Ketahanan Pangan

Kebijakan pembangunan bidang pangan dalam NK RAPBN TA 2023 diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan baik pertanian maupun perikanan. Adapun rumusan kebijakan terhadap ketahanan pangan dapat dilihat pada gambar 1.

^{*)} *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: adhi.wibowo@dpr.go.id*

Gambar 1. Rumusan Kebijakan Ketahanan Pangan



Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2023.

Arah kebijakan ketahanan pangan dalam NK RAPBN TA 2023 akan diimplementasikan pada beberapa program pemerintah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan. Anggaran tersebut berfokus kepada peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran dilakukan dengan penyediaan bantuan sarana prasarana (sarpras) produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan terintegrasi, penguatan *food estate* dan korporasi petani, irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan pada NK RAPBN TA 2023 dapat dilihat pada gambar 2. Dari berbagai upaya tersebut, diharapkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masing-masing berada pada kisaran angka 105-107 dan 107-108. Untuk mencapai output prioritas yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan anggaran yang akan disampaikan pada sub bagian berikutnya.

Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan serta Pelaksanaannya

Belanja negara dalam RAPBN TA 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.041,7 triliun, lebih lanjut *tagging* untuk ketahanan pangan sebanyak 3,1 persen atau setara dengan Rp95 triliun. Anggaran ketahanan pangan tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), belanja non Kementerian/Lembaga (K/L), maupun Tranfer ke Daerah dan Dana Desa. Selain dalam *tagging* ketahanan pangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dukungan terhadap ketahanan pangan

Tabel 1. Output Prioritas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No.	Output	Target
1	Kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya padi	229.800 Ha
2	Kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung	40.000 Ha
3	Kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai	150.000 Ha
4	Kawasan bawang merah seluas	5.000 Ha
5	Optimalisasi reproduksi	4.000.000 akseptor
6	Bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan	9.275 unit
7	benih dan calon induk ikan yang disalurkan kepada masyarakat	118 juta ekor
8	Bantuan sarana chest freezer (peti beku)	300 unit
9	Pembangunan bendungan lanjutan dan bendungan baru	22 unit dan 7 unit
10	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi oleh pusat dan daerah	6.900 Ha dan 48.564 Ha
11	Rehabilitasi jaringan irigasi oleh pusat dan daerah	98.700 Ha dan 111.647 Ha
12	Pembangunan jalan pertanian	2.589 unit
13	Pembangunan olahan pakan ternak	495 unit
14	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	53 Pelabuhan
15	Pembangunan/rehabilitasi pembenihan	97 unit
16	Dana ketahanan pangan dan pertanian untuk masyarakat	1.255 Kelompok

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2023.

dapat ditemui pada postur Pembiayaan. Dalam BPP khususnya belanja K/L, anggaran ketahanan pangan tersebar pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan).

Anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan pada belanja non K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan non cair), subsidi bunga kredit, resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan. Terkait dengan subsidi pupuk, Rp25,3 triliun disiapkan untuk menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk NPK dan Urea. Pupuk bersubsidi hanya diberikan terhadap 9 jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu. Sementara itu, penyalurannya dilakukan melalui skema Subsidi Langsung Pupuk terhadap petani dengan kartu tani secara bertahap.

Skema Subsidi Resi Gudang (SRG) diproyeksikan sebesar Rp2,3 miliar. Skema SRG diberikan sebagai upaya membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai SRG. Saat ini komoditas yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh skema SRG yaitu komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu: (1) perluasan penerima; (2) penambahan bank pelaksana syariah; (3) peningkatan gudang aktif; dan (4) integrasi pembiayaan hulu dan hilir.

Subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, anggaran subsidi tersebut direncanakan sebanyak Rp45,6

triliun pada tahun 2023. Meskipun demikian, subsidi tersebut tidak hanya diberikan kepada ketahanan pangan namun juga bagi pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum, meningkatkan daya saing usaha serta akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk petani.

Anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan melalui Dana Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Pada DAK Fisik, dukungan diberikan dengan DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian, Perikanan dan Hewani) yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan, perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, dan bidang jalan. Adapun alokasi tersebut dapat ditemukan pada DAK Fisik Irigasi senilai Rp1,6 triliun dan DAK Fisik Jalan sejumlah Rp10,6 triliun. Sementara DAK Non Fisik melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sejumlah Rp300 miliar. Alokasi DKPP diarahkan guna mendukung pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui Dinas Pertanian dan/ atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada tahun 2023 DKPP akan diberikan kepada 5.782 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 933 Pusat Kesehatan Hewan, dan 1.255 kelompok masyarakat. Lebih lanjut, penggunaan anggaran Dana Desa (DD) juga akan disinkronisasikan dengan prioritas nasional diantaranya untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya termasuk pembangunan lumbung pangan desa.

Pemerintah dalam postur pembiayaan juga mengalokasikan investasi kepada BUMN dan Organisasi Internasional

demikian penguatan ketahanan pangan. Investasi terhadap BUMN diberikan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia/ID Food. Pembiayaan investasi tersebut dialokasikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai sejumlah Rp2,56 triliun yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan inklusivitas petani, peternak dan nelayan, serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia. Dengan demikian, ID Food akan berperan dalam ekosistem pangan dari hulu hingga hilir yang selama ini belum terbentuk.

Adapun investasi sejumlah US\$3,0 juta atau setara dengan Rp44,3 miliar diserahkan kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD). IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi mendanai pembangunan pertanian. Sebagai anggota IFAD, Indonesia berkewajiban dalam penyertaan modal. Komitmen pemerintah tersebut berdasarkan pada *Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, Februari 2021 di Roma. Pemerintah berkomitmen senilai US\$10 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US\$3 juta pada tahun 2022 dan 2023, serta US\$4 juta di 2024. Lebih lanjut, sebagai anggota Indonesia juga berkesempatan untuk memperoleh bantuan dari IFAD.

Dengan beberapa kebijakan dan dukungan anggaran yang melibatkan banyak K/L dalam urusan pangan sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaannya ditemui ego sektoral yang ditenggarai menghambat terwujudnya ketahanan pangan. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Perpres tersebut berimplikasi pada pengalihan kewenangan yang terkait pangan pada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag)

dan Kementerian BUMN menjadi tugas dan fungsi Bapanas. Lebih lanjut, melalui Perpres tersebut Badan Urusan Logistik (Bulog) akan bertugas sebagai operator dalam hal stabilisasi harga pangan untuk mendukung Bapanas sebagai regulator guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Mengingat selama ini Bulog hanya fokus terhadap komoditas beras belum mencakup padi, jagung sebagaimana amanat Perpres 48/2018.

Komitmen hingga Penguatan Peran Bulog dan ID Food Perlu Jadi Perhatian

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan ketahanan pangan, meskipun demikian terdapat catatan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah diantaranya: **pertama**, memasuki tahun politik diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder agar pembangunan ketahanan pangan dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan. **Kedua**, sebagai *leading* sektor pangan Bapanas dalam waktu dekat perlu mengintegrasikan kebijakan terkait pangan yang tersebar di beberapa K/L. Dengan demikian, kesediaan (stok) dan harga sembilan bahan pokok (Sembako) dapat terjaga. **Ketiga**, penguatan peran Bulog tidak terbatas pada penyerapan beras sebagai cadangan pemerintah, namun dapat bertindak sebagai ujung tombak dari Bapanas dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Sembako. **Keempat**, ID Food selaku Holding BUMN Pangan dapat segera membentuk ekosistem sektor pangan yang saling terkoneksi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian persoalan fluktuasi harga pangan dapat teratasi dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan dapat meningkat.

Daftar Pustaka

Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati (petikan Pidato Bung Karno tahun 1952)
diakses dari: <https://polbangtanmalang.ac.id/pangan-rakyat-soal-hidup-dan-mati-petikan-pidato-bung-karno>.

The Economist Grup. 2021. Global Food Security Index 2021.

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 – 2021

Firly Nur Agustiani*)
Tio Riyono**)

Abstrak

BLT Desa merupakan program perlindungan sosial yang diinisiasi pemerintah karena adanya masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, yang mulai disalurkan paling cepat April 2020. Dalam implementasinya ditemukan beberapa penyimpangan dan kendala terkait data penerima BLT Desa, penetapan APBDes serta penyaluran BLT Desa. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan.

Desa merupakan ujung tombak bangsa dalam menyejahterakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah hingga kini menggulirkan dana desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Dana desa ini berdampak langsung ke masyarakat desa. Maret tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berpengaruh pada segala sektor, tanpa terkecuali masyarakat desa. Berlandaskan adanya pandemi COVID-19 tersebut, untuk meminimalisir meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang dananya bersumber dari Dana Desa (BLT Desa) sejak April 2020 hingga Desember 2022.

Tahun 2023 Indonesia diprediksi sudah tidak mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu, BLT Desa dialihkan menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem dengan konsep dan sumber dana yang sama dengan BLT Desa, hanya saja kriteria penerimanya lebih spesifik, yakni ditekankan hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp11.633 per hari. Artikel ini akan mengevaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2020 -2021 sehingga dapat menjadi perbaikan program Pemerintah ke depan.

BLT Desa Melindungi Masyarakat Miskin

Pandemi COVID-19 telah mampu melemahkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin di desa. Merespon hal tersebut, Pemerintah membuat kebijakan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan sosial pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, serta untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Maka dari itu, adanya BLT Desa ini mengakibatkan pergeseran tujuan prioritas penggunaan dana desa. Dana desa yang semula diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, karena kedaruratan maka desa diwajibkan mengutamakan mengalokasikan anggaran dana desa untuk BLT Desa.

BLT Desa merupakan pemberian uang tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak oleh COVID-19, masyarakat miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis, dan masyarakat yang tidak menerima

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: firlynuragustiani@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: tio.riyono@dpr.go.id*

bantuan dari program perlindungan sosial lainnya, bahkan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Persentase BLT Desa dan mekanisme penyaluran BLT Desa mengalami beberapa perubahan pada tahun 2020 sampai 2022, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Periode 2020 – 2022

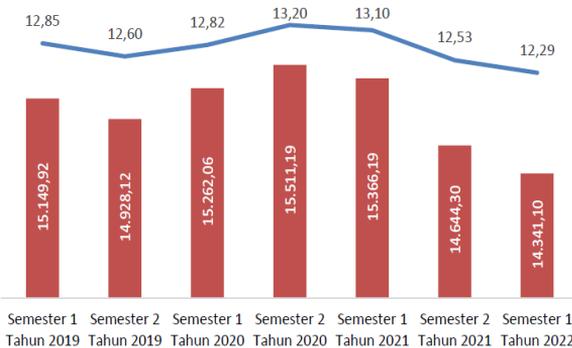
Tahun	Persentase BLT Desa	Penyaluran BLT kepada KPM
2020	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 25 persen dari dana desa (kurang dari Rp800 juta) Maksimal 30 persen dari dana desa (Rp800 juta – Rp1,2 miliar) Maksimal 35 persen dari dana desa (lebih dari Rp1,2 miliar). 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan April sampai Juni 2020 BLT yang diterima setiap KPM sebesar Rp600.000 per bulan; dan Bulan Juli sampai Desember 2020 BLT yang diterima setiap KPM sebesar Rp300.000 per bulan
2021		KPM menerima Rp300.000 per bulan.
2022	Maksimal 40 persen dari Dana Desa	KPM menerima Rp300.000 per bulan

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT 2020 – 2022, diolah.

Profil Kemiskinan Di Desa

Kebijakan pemerintah untuk menyegerakan penyaluran BLT Desa agar desa cepat pulih di sektor perekonomian melalui daya beli masyarakat terlihat dari profil kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin di desa dan persentase tingkat kemiskinan di desa (Gambar 1).

Gambar 1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan Di Desa Periode 2019 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2022, diolah.

Penurunan jumlah penduduk dan menurunnya persentase penduduk miskin di desa sejak semester 1 tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2022, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat miskin dan memulihkan perekonomian melalui program perlindungan sosial dapat dikatakan berhasil. Secara nasional

persentase tingkat kemiskinan pada semester 1 tahun 2022 ada pada angka 9,54 persen (BPS, 2022). Untuk itu, pada tahun 2022 program BLT Desa ini masih dilanjutkan agar dapat mencapai target kemiskinan pada RPJMN periode 2020-2024 sebesar 6,5 persen - 7,0 persen.

Masih Lemahnya Akurasi Data Hingga Tidak Sesuai Penyaluran Masih Menjadi Kendala BLT Desa

Ditemui beberapa penyimpangan-penyimpangan dan kendala di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. **Pertama**, lemahnya akurasi data penerima BLT Desa yang dikuatkan dari beberapa temuan antara lain: (i) terdapat 26 Pemerintah Daerah (Pemda) menyalurkan BLT Desa kepada masyarakat yang tidak sesuai kriteria KPM, adanya duplikasi penerima, KPM BLT Desa menerima Bansos lain. Dan terdapat 27 Pemda bermasalah terkait aspek perencanaan dan penganggaran BLT Desa, diantaranya verifikasi dan validasi data KPM belum memadai dan daftar KPM belum disahkan, serta pemerintah desa tidak memublikasikan daftar KPM BLT Desa kepada masyarakat (BPK, 2022); (ii) masih sering ditemukan data penerima BLT Desa yang tidak tepat sasaran karena tumpang tindih dengan data penerima Bansos lainnya (Tayip, 2020); (iii) terdapat duplikasi penerima BLT Desa, karena penerima BLT Desa ada yang masih menerima program perlindungan sosial lain seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu terdapat data KPM yang masih tercatat tetapi yang bersangkutan sudah meninggal (BPKP, 2020); (iv) terdapat perbedaan data di level Desa, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang mencerminkan masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (KPPOD, 2021); dan (v) lemahnya data DTKS yang tidak update sehingga relawan desa harus bekerja keras untuk mencocokkan dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid, dan tidak transparannya hasil pendataan

non DTKS, serta pendataan masyarakat miskin baru yang belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima BLT Desa (Ombudsman, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan terkait data penerima BLT Desa, maka agar penerima BLT Desa tepat sasaran, Kepala Daerah dan Kepala Dinas harus menggunakan data non DTKS hasil *cleansing* yang sudah disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, dan tetap mengedepankan transparansi data. Sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data melalui verifikasi yang cermat agar diperoleh data yang valid dan akurat. Selain itu, pemerintah desa harus transparan memublikasikan data KPM, tujuannya selain masyarakat mengetahui daftar penerima BLT Desa, masyarakat yang berhak menerima BLT Desa tapi belum terdaftar dapat aktif menghubungi perangkat desa.

Kedua, lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal ini berdampak pada penetapan jumlah anggaran untuk BLT Desa (KPPOD, 2021) dan ditemui juga 26 Pemda yang penyaluran BLT Desa nya terlambat dilaksanakan (BPK, 2022). Sehingga, keterlambatan penyaluran BLT Desa tidak terulang lagi, pemerintah desa harus proaktif terhadap peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Ketiga, terdapat 26 Pemda yang bermasalah dalam penyalurannya, yang mana nominal BLT Desa yang diterima KPM jumlahnya tidak tepat (BPK, 2022). Untuk mengatasi masalah ini pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan pengawasan penyaluran BLT Desa.

Keempat, terdapat penyaluran ganda BLT Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (BPK, 2021). Oleh karena itu Kementerian

Keuangan (Kemenkeu), Kemendes PDTT, dan Kemendagri harus memiliki sistem yang terintegrasi yang didalamnya mencakup data penerima program perlindungan sosial yang ada pada DTKS dan non DTKS, untuk menghindari penyaluran BLT Desa bersumber ganda (APBD dan APBN).

Dari empat masalah diatas pemerintah harus bertindak tegas agar pemerintah terkait tidak lalai dalam mengidentifikasi dan menyalurkan BLT Desa. Meski sebenarnya pada tahun 2023 BLT Desa dialihkan menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem, tetapi pemerintah tetap harus membenahi dan menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang ada pada tahun 2020 dan 2021, agar masalah yang timbul pada BLT Desa tidak ada lagi di BLT Kemiskinan Ekstrem.

Melihat dari beberapa permasalahan tersebut, maka upaya pemerintah untuk mengimplementasikan BLT Kemiskinan Ekstrem tahun 2023, tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan terkait data yang spesifik, untuk itu pemerintah desa harus sudah siap data yang akurat dan valid, terkait penggolongan masyarakat yang ada di kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021".

Badan Pemeriksa Keuangan. 2022. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021".

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2020. "BPKP Sebutkan Masalah Data Penyaluran BLT Dana Desa". Diakses dari <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyalaran-BLT-Dana-Desa> pada tanggal 14 Agustus 2022.

Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kementerian Dalam Negeri. 2021. "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021". Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan. 2021. "Pedoman Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021". Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024".

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2021. "Ragam Dalih Soal Leletnya Penyaluran BLT Dana Desa". Diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=960> pada tanggal 14 Agustus 2022.

Ombudsman. 2020. "Polemik BLT Dana Desa". Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--polemik-blt-dana-desa> pada tanggal 14 Agustus 2022.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Tayip, Mahmud. 2020. "Akurasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Melalui Aplikasi Google Forms". Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.

Dampak Resesi Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Indonesia

Nova Aulia Bella*)
Rosalina Tineke Kusumawardhani**)

Abstrak

Minusnya perekonomian Amerika Serikat selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2022 mengindikasikan terjadinya resesi di negara tersebut. Dampaknya dirasakan sampai ke Indonesia yang mana merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu diprediksi mengalami penurunan kinerja ekspor, capital outflow modal asing dari Indonesia, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran pasar dalam negeri serta melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi dampak resesi Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dengan menyesuaikan tingkat suku bunga dalam negeri dan penajaman insentif fiskal untuk menarik kembali penanaman modal asing ke Indonesia.

Perekonomian Amerika Serikat saat ini diyakini sedang dalam masa resesi. Hal ini disebabkan perekonomian negara tersebut tercatat mengalami minus dalam dua kuartal berturut-turut di paruh pertama tahun 2022 ini. Pada kuartal pertama tahun 2022 tercatat minus 1,6 persen (YoY) dan pada kuartal kedua tahun 2022 tercatat minus 0,9 persen (YoY). International Monetary Fund (IMF) memprediksi Kondisi tersebut masih akan berlanjut hingga tahun 2023. Kondisi tersebut juga diiringi dengan peningkatan persentase pengangguran di Amerika Serikat menjadi sekitar 4,6 persen.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan merupakan negara dengan perekonomian terbuka, resesi di Amerika Serikat tidak hanya akan berdampak di negara tersebut melainkan akan berdampak juga di banyak negara mitra dagang Amerika Serikat termasuk juga

Indonesia. Beberapa dampak yang mulai dirasakan di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Risiko Penurunan Permintaan Barang Ekspor Indonesia Ke Amerika Serikat

Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor non migas terbesar kedua Indonesia dengan nilai ekspor di tahun 2021 mencapai 25,79 miliar USD atau 11,76 persen dari total ekspor non migas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,1 persen per tahun (tabel 1).

Resesi dan peningkatan pengangguran di Amerika Serikat akan berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat Amerika Serikat secara agregat, termasuk permintaan produk dari Indonesia. Ekspor

Tabel 1. 10 Besar Negara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia (dalam Juta USD)

No	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Trend (%) 17-21	Perub (%) 2020-2021	Kontribusi (%) 2021
NON MIGAS		153.083,8	162.840,9	155.893,7	154.940,8	219.362,1	6,93	41,58	100
1	REP.RAKYAT CINA	21.349,7	24.408,1	25.894,3	29.936,4	51.088,9	21,52	70,66	23,29
2	AMERIKA SERIKAT	17.134,4	17.667,7	17.806,1	18.622,4	25.792,8	9,1	38,5	11,76
3	JEPANG	14.690,6	16.307,9	13.814,4	12.885,3	16.894,3	0,44	31,11	7,7
4	INDIA	13.950,3	13.667,8	11.700,6	10.179,0	13.112,6	-4,1	28,82	5,98
5	MALAYSIA	7.073,4	7.903,6	7.669,3	6.970,2	10.634,6	7,14	52,57	4,85
6	PILIPINA	6.600,0	6.812,3	6.754,5	5.858,5	8.601,9	3,86	46,83	3,92
7	SINGAPURA	9.089,5	9.002,4	9.437,2	8.533,3	8.083,3	-2,84	-5,27	3,68
8	KOREA SELATAN	6.334,2	7.507,8	6.100,1	5.609,5	7.958,0	1,66	41,87	3,63
9	VIETNAM	3.575,5	4.546,6	5.140,8	4.927,2	6.740,3	14,43	36,8	3,07
10	TAIWAN	2.840,9	3.718,0	3.779,9	3.726,4	6.360,7	17,52	70,69	2,9

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022.

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: novaabella10@gmail.com

***) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rosalina@dpr.go.id

Indonesia ke Amerika Serikat di antaranya adalah komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT), karet, alas kaki, kelapa sawit dan produk turunannya, serta komponen elektronik. Dampak dari penurunan ekspor mulai dirasakan oleh pelaku industri dalam negeri. Salah satu industri yang sangat terdampak dari resesi tersebut adalah industri alas kaki. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS pada akhir kuartal pertama tahun 2022 tercatat terjadi penurunan ekspor produk alas kaki ke Amerika Serikat sebesar 42,74 persen dari 176,9 juta USD menjadi 101,3 juta USD.

Selain pelaku industri produk alas kaki, pelaku industri tekstil dalam negeri juga mulai terdampak oleh resesi Amerika Serikat. Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mencatat mulai terjadi penurunan permintaan jumlah produk tekstil dari *buyer* Amerika Serikat. Pengurangan jumlah pemesanan tersebut mayoritas dari *buyer* di segmen garmen. APSyFI juga memprediksikan bahwa industri tekstil nasional kemungkinan besar turun di kisaran 10 persen sampai dengan akhir tahun ini. Selain tantangan penurunan permintaan dari pasar Amerika Serikat, industri tekstil dalam negeri juga menghadapi tantangan lain yaitu maraknya produk tekstil impor dari luar negeri baik yang bersifat legal maupun ilegal.

Penurunan ekspor pada APBN dirasakan secara langsung melalui penurunan pajak ekspor. Dalam jangka panjang, jika penurunan permintaan ekspor tersebut terjadi secara berkelanjutan, akan berdampak pada penurunan kinerja industri manufaktur dalam negeri. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur dalam negeri. Turunnya ekspor sektor industri sebanyak 4,9 persen akan mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja sektor lain di luar sektor industri (278,9 ribu orang) lebih besar dibanding hilangnya kesempatan kerja sektor industri itu sendiri (187,2 ribu orang) (Wibowo, 2013). Hal ini disebabkan karena ekspor sektor

industri mempunyai keterkaitan yang sangat besar terhadap sektor yang lain. Dengan tingginya dampak *multiplier* dari penurunan sektor industri ke sektor yang lain, dikhawatirkan turunnya pertumbuhan sektor industri dapat berpengaruh cukup signifikan pada tingkat pengangguran dalam negeri. Sebagian besar produk dari Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat berasal dari industri padat karya maka secara tidak langsung dengan penurunan ekspor akan menyebabkan penurunan perolehan penerimaan negara melalui pajak penghasilan dan pajak badan usaha.

Kekhawatiran *Capital Outflow* Sebagai Dampak Kenaikan Suku Bunga Oleh The Fed

Sebagai respon resesi ekonomi Amerika Serikat, The Fed kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 75 basis *points* (bps) ke kisaran 2,25 persen - 2,5 persen pada akhir Juli 2022. Kenaikan suku bunga tersebut berpotensi pada keluarnya aliran modal asing (*capital outflow*) dari pasar modal dalam negeri sebagai akibat dari investor asing yang menarik modalnya dari Indonesia dan memilih instrumen yang lebih aman dan menguntungkan di Amerika Serikat. Sepanjang Juli 2022 investasi portofolio mencatat *net outflow* 2,05 miliar USD.

Di dalam sistem nilai tukar mengambang (*Floating Exchange Rate*), nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Permintaan dan penawaran valuta asing dalam kenyataannya bukan hanya dilakukan pada saat kegiatan ekspor dan impor saja, namun juga dipengaruhi oleh arus modal yang masuk dan keluar di suatu negara. Permintaan akan valuta asing juga berasal dari kebutuhan valuta asing untuk membayar penanaman modal di luar negeri atau penarikan modal dan penawaran akan valuta asing juga berasal dari kegiatan penanaman modal asing ke dalam negeri (*capital inflow*) yang membutuhkan mata uang dalam negeri untuk diinvestasikan. Dengan keluarnya arus modal asing dari Indonesia akan

berakibat pada penurunan permintaan terhadap rupiah di pasar uang. Penurunan permintaan rupiah akan berimplikasi pada pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Selama periode dua bulan terakhir (Juli-Agustus 2022), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat cenderung mengalami pelemahan.

Nilai tukar rupiah berhubungan dengan transaksi APBN yang berkaitan dengan mata uang asing, seperti pembelian minyak, pemberian subsidi BBM, penerimaan pinjaman dan pembayaran hutang luar negeri. Sehingga, dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran. Semakin lemah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing maka semakin besar APBN yang harus dikeluarkan untuk membiayai subsidi BBM dan bunga utang pinjaman luar negeri. Di tahun 2022 diperkirakan subsidi BBM mencapai Rp578 triliun. Sedangkan dampak kenaikan suku bunga the Fed pada Surat Berharga Negara (SBN) adalah terjadinya *capital outflow* dari pasar SBN sebesar Rp32,12 triliun pada Mei 2022, lalu turun menjadi Rp15,51 triliun pada Juni 2022.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Menanggulangi Dampak Resesi Amerika Serikat Bagi Indonesia

Resesi yang sedang dialami oleh Amerika Serikat perlu disikapi secara cepat dan tanggap oleh Pemerintah agar dampaknya tidak semakin meluas. Sebagai respon atas risiko dampak penurunan ekspor ke Amerika Serikat, pemerintah dinilai perlu untuk memaksimalkan pasar domestik agar produksi barang ekspor yang tidak terserap di pasar Amerika Serikat dapat secara optimal diserap di pasar dalam negeri. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menekan arus impor atas barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri. Pemerintah dapat menerbitkan kebijakan larangan sementara atas impor pada produk-produk yang dapat diproduksi di dalam

negeri khususnya produk tekstil dan alas kaki. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menertibkan dan mencegah masuknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kedua langkah tersebut perlu diambil agar para pelaku industri dalam negeri dapat lebih bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri.

Pemerintah perlu mulai menjajaki kemungkinan perluasan ekspor ke negara-negara non tradisional sebagai langkah mendiversifikasi pasar tujuan ekspor agar tidak selalu bergantung ke pasar negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Pasar yang dinilai cukup potensial sebagai alternatif negara tujuan ekspor contohnya seperti negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Dimana tren ekspor non migas ke negara-negara tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dapat mulai melakukan pameran dagang produk-produk unggulan industri dalam negeri dan memberikan fasilitas dagang (tarif dan non tarif) khusus baik regional maupun bilateral kepada negara-negara tersebut.

Sebagai langkah mitigasi atas risiko arus investasi asing yang keluar dari Indonesia, Bank Indonesia perlu mengambil kebijakan moneter dengan turut meningkatkan suku bunga dalam negeri dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN. Hal tersebut perlu dilakukan agar suku bunga dalam negeri menjadi lebih kompetitif sehingga menarik para pemilik modal asing agar kembali berinvestasi di Indonesia. Selain dengan kebijakan moneter, Pemerintah juga perlu mengambil langkah kebijakan fiskal berupa penajaman insentif fiskal yang meliputi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), dan pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan

bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*). Berdasarkan publikasi OECD, kebijakan terkait iklim investasi dimana salah satunya merupakan insentif fiskal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh untuk menarik investasi di suatu negara.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (2022). Kurs Transaksi Bank Indonesia. Diakses melalui: <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Indonesia. (2015). Keluar dari Resesi. Diakses melalui: <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2015/11/05/keluar-dari-resesi-berly-martawardaya>.

Katadata. (2022). The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga Pada Juli 2022. diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/28/the-fed-kembali-naikkan-suku-bunga-pada-juli-2022>.

Kementerian Keuangan. (2015). Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Diakses melalui: <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/112/72>.

Kementerian Perdagangan. (2022). Perkembangan Ekspor Non Migas (Negara Tujuan). diakses melalui: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-negara>.

Kementerian Investasi /Badan Kordinasi Penanaman Modal. (2022). Pemerintah Indonesia Gencarkan Insentif Fiskal Bagi Penanaman Modal. diakses melalui: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-indonesia-gencarkan-insentif-fiskal-bagi-penanaman-modal>.

Reuters. (2022). Fed's Aggressive Rate-Hike Path Bolstered By New Inflation, Wage Data. Diakses melalui: <https://www.reuters.com/markets/us/feds-aggressive-rate-hike-path-bolstered-by-new-inflation-wage-data-2022-07-29>.

Trademap. (2022). Bilateral trade between Indonesia and United States of America. diakses melalui: <https://www.trademap.org>.

Wibowo, Tri. (2013). Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Diakses melalui: <http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/112>.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

